

POLITIK IDENTITAS DALAM KOMUNIKASI POLITIK

Ahmad Sampurna Rambe¹, Siti Auliza², Khalisah Salsabila³, Novendra Hariyadi⁴,
Rifky Bas Pratama⁵

ahmadsampurna@uinsu.ac.id¹, sitiauliza392@gmail.com², salsabilakhalisah210804@gmail.com³,
vendrahariadi@gmail.com⁴, rifkysembiring04@gmail.com⁵

UINSU

ABSTRAK

Dalam lanskap politik Indonesia yang multikultural, politik identitas menjadi strategi yang kerap digunakan aktor politik untuk membangun kedekatan dengan kelompok tertentu. Melalui komunikasi politik, identitas seperti agama, etnisitas, dan budaya sering dimobilisasi guna meraih dukungan elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara politik identitas dan komunikasi politik, serta dampaknya terhadap proses demokrasi. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai literatur dan kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai contoh nyata penerapan politik identitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun strategi ini efektif dalam meningkatkan partisipasi kelompok tertentu.

Kata Kunci: Politik Identitas, Komunikasi Politik, Demokrasi, Pemilu, Pilkada.

ABSTRACT

In Indonesia's multicultural political landscape, identity politics is often used by political actors to build affinity with specific groups. Through political communication, identities such as religion, ethnicity, and culture are mobilized to gain electoral support. This study aims to examine the relationship between identity politics and political communication, as well as its impact on democratic processes. Using a qualitative method through literature study, this research analyzes various sources and the 2017 Jakarta gubernatorial election as a real case of identity politics in practice. The findings indicate that while this strategy can effectively increase participation among certain groups.

Keywords: Identity Politics, Political Communication, Democracy, Election, Local Election.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika politik kontemporer, komunikasi politik memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, membangun legitimasi, serta memengaruhi perilaku pemilih. Komunikasi politik bukan hanya sekadar penyampaian informasi, melainkan juga sebuah strategi yang dikonstruksi secara sadar oleh aktor politik untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankannya. Di tengah kompleksitas masyarakat modern yang multikultural, munculnya praktik politik identitas dalam ranah komunikasi politik menjadi sebuah fenomena yang kian mengemuka dan patut untuk dikaji secara kritis.

Politik identitas merujuk pada penggunaan elemen-elemen identitas sosial seperti agama, etnisitas, ras, gender, atau kelompok budaya tertentu sebagai dasar dalam membangun dukungan politik. Dalam praktik komunikasi politik, identitas ini sering dimanfaatkan sebagai alat untuk menarik simpati pemilih yang merasa memiliki kesamaan latar belakang dengan kandidat atau partai politik. Strategi ini dianggap efektif dalam menjangkau emosi dan loyalitas kelompok tertentu, terlebih di masyarakat yang secara historis memiliki ikatan identitas yang kuat.

Di Indonesia, sebagai negara yang memiliki keragaman suku, agama, dan budaya, politik identitas sering muncul dalam berbagai bentuk kontestasi politik, baik pada level lokal maupun nasional. Penggunaan simbol-simbol keagamaan, penonjolan asal-usul etnis, hingga narasi kita versus mereka menjadi strategi yang cukup sering dijumpai, terutama

menjelang pemilu atau pilkada. Keberadaan media sosial dan media massa turut memperkuat penyebaran pesan-pesan berbasis identitas ini, yang terkadang berujung pada polarisasi sosial dan konflik horizontal.

Meskipun politik identitas dapat berfungsi sebagai alat representasi kelompok marjinal yang selama ini kurang terwakili, penggunaan yang berlebihan dan manipulatif justru dapat mengancam integrasi sosial dan merusak tatanan demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana politik identitas bekerja dalam komunikasi politik, serta dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena politik identitas dalam praktik komunikasi politik di Indonesia, khususnya dalam konteks kampanye dan kontestasi pemilu. Penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*), di mana data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dan dokumen akademik yang membahas secara langsung konsep politik identitas dan komunikasi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik identitas merupakan strategi politik yang memanfaatkan identitas kelompok seperti etnis, agama, ras, atau budaya sebagai dasar dalam membentuk solidaritas politik dan menuntut representasi dalam ranah kekuasaan. Fenomena ini muncul ketika individu atau kelompok merasa identitas mereka tidak diakui atau terpinggirkan dalam struktur sosial dan politik yang ada. La Ode Machdani Afala dalam bukunya menjelaskan bahwa politik identitas di Indonesia sering kali berkaitan dengan isu-isu etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan lokal. (Afala 2020 : 11).

Ia menekankan bahwa politik identitas dapat menjadi alat untuk memperjuangkan hak-hak kelompok tertentu, namun juga berpotensi menimbulkan konflik jika digunakan secara eksklusif dan tidak inklusif. Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan politik dari aktor politik kepada publik atau antaraktor politik lainnya, dengan tujuan membentuk opini, membangun citra, atau memengaruhi kebijakan. Proses ini melibatkan berbagai media dan saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, pidato publik, dan debat politik.

Dr. Lely Arrianie dalam bukunya menyatakan bahwa komunikasi politik mencakup semua bentuk komunikasi yang digunakan oleh politisi, media, dan publik dalam menyampaikan pesan politik. Ia menekankan pentingnya memahami bagaimana pesan politik dikonstruksi dan disampaikan untuk mempengaruhi opini publik dan perilaku pemilih. (Arrianie, Lely 2023 : 5).

Hubungan antara Politik Identitas dan Komunikasi Politik

Politik identitas dan komunikasi politik saling berkaitan erat, terutama dalam konteks kampanye politik. Aktor politik sering kali menggunakan identitas kelompok sebagai strategi komunikasi untuk membangun kedekatan dengan segmen pemilih tertentu. Dengan menonjolkan kesamaan identitas, seperti agama atau etnisitas, politisi dapat menciptakan rasa kebersamaan dan loyalitas di antara pemilih.

Namun, penggunaan politik identitas dalam komunikasi politik juga memiliki risiko. Jika tidak dikelola dengan bijak, strategi ini dapat memperdalam polarisasi sosial dan memicu konflik antar kelompok. Oleh karena itu, penting bagi aktor politik untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari penggunaan identitas dalam komunikasi politik mereka. Kontemporer mengulas bagaimana komunikasi politik di Indonesia sering

kali dipengaruhi oleh identitas kelompok, dan hal ini dapat mempengaruhi dinamika politik nasional. (Heriyanto 2020).

Strategi Politik Identitas Dalam Komunikasi Politik

Strategi politik identitas merupakan pendekatan komunikasi politik yang menggunakan simbol-simbol identitas seperti agama, etnisitas, budaya, dan bahasa untuk membentuk basis dukungan politik. Dalam konteks politik Indonesia yang majemuk, politik identitas seringkali digunakan untuk menarik simpati kelompok tertentu yang merasa memiliki kesamaan identitas dan pengalaman sosial. Politikus memanfaatkan hal ini dengan menyusun pesan politik yang sesuai dengan nilai dan norma kelompok sasaran. (Miriam 2013).

Komunikasi politik berbasis identitas seringkali membangun narasi eksklusif, yaitu membedakan antara kami dan mereka, untuk memperkuat solidaritas internal dan memosisikan lawan politik sebagai ancaman terhadap kelompok tertentu. (Burhanuddin 2019). Dalam kampanye politik, hal ini terlihat dari penggunaan simbol keagamaan, istilah-istilah bernuansa ideologis, atau bahkan dukungan dari tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh besar terhadap pemilih.

Namun, strategi ini tidak bebas dari risiko. Politik identitas yang eksploitatif berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan memperdalam polarisasi masyarakat. (Saiful 2012). Hal ini pernah terjadi dalam berbagai kontestasi politik lokal di Indonesia, seperti Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana identitas agama menjadi faktor utama dalam komunikasi politik. Meskipun efektif dalam jangka pendek, strategi semacam ini dapat mengancam kohesi sosial dan semangat pluralisme bangsa.

Di sisi lain, politik identitas juga dapat berfungsi sebagai alat perjuangan kelompok marginal untuk mendapatkan representasi politik yang lebih adil. (Mohtar 2002). Oleh karena itu, penting bagi para aktor politik untuk menggunakan pendekatan ini secara etis dan bertanggung jawab, serta mendorong komunikasi lintas identitas yang konstruktif dan inklusif.

Dampak dan Implikasi Efek Positif dan Negatif Politik Identitas Dalam Demokrasi

Politik identitas telah memainkan peran signifikan dalam memberdayakan kelompok-kelompok yang sebelumnya termarginalkan dan meningkatkan partisipasi serta representasi mereka dalam proses demokrasi. Sebagaimana disoroti oleh (Verloo dan Lombardo),gerakan identitas seperti feminisme, hak-hak sipil, dan perjuangan kelompok indigenous telah berkontribusi dalam mempromosikan kesetaraan, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak kelompok rentan. Melalui advokasi dan mobilisasi politik, kelompok-kelompok ini telah berhasil memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dan representatif. (Verlo, M 023 : 3-4).

Politik identitas memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi, yang menghadirkan dampak positif dan negatif. Di sisi positif, politik identitas memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dengan meningkatkan partisipasi dan representasi politik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menyediakan wadah bagi suara-suara yang sebelumnya terabaikan, politik identitas dapat memperkuat kohesi sosial dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif, yang pada akhirnya akan mendorong masyarakat yang lebih adil dan lebih seimbang. Misalnya, pengakuan terhadap hak-hak minoritas dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan berbagai kelompok, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik.

Namun, di sisi negatifnya, politik identitas juga dapat memicu perpecahan dan konflik antarkelompok, memperkuat stereotip, dan menciptakan pengucilan sosial. Ketika identitas kelompok lebih diutamakan daripada identitas nasional, hal itu dapat mengancam

stabilitas demokrasi dan mengurangi solidaritas di antara warga negara. (Putu Sastra). Dalam konteks ini, politik identitas dapat menarik garis tegas antara kita dan mereka, yang berpotensi menyebabkan polarisasi yang lebih dalam dalam masyarakat. Ketegangan yang timbul dari perbedaan identitas ini dapat menghambat dialog dan kolaborasi yang konstruktif antarkelompok, serta mengurangi kemampuan masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi tantangan bersama. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara mengakui identitas kelompok dan memupuk identitas nasional yang inklusif, memastikan bahwa demokrasi berfungsi secara efektif dan menciptakan ruang bagi semua warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dan adil..

KESIMPULAN

Politik identitas dan komunikasi politik memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi, terutama dalam konteks demokrasi yang multikultural seperti Indonesia. Politik identitas berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, meningkatkan politik partisipasi, dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif. Namun di sisi lain, penggunaan politik identitas yang berlebihan dan manipulatif dapat memicu perpecahan, memperkuat stereotip, dan menciptakan eksklusi sosial. Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. (Nugroho 2019 : 45). menjadi contoh nyata bagaimana identitas politik dapat dimobilisasi untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilih, namun juga meninggalkan dampak negatif berupa polarisasi sosial yang mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo Miriam, (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Fahmi, M., & Nugroho, H. (2019). Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1).
- Gun Gun, Heryanto. (2020). *Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- La Ode Machdani, Afala. (2020). *Politik Identitas di Indonesia: Edisi Revisi*. Malang: UB Press.
- Lely, Arrianie. (2023) *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lombardo, E., & Verloo (2023). Intersectionality and identity politics in European democracies. *European Journal of Women's Studies*.
- Mas'oed Mohtar. (2002). *Ilmu Politik: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Muhtadi Burhanuddin, (2019). *Politik Identitas dan Dinamika Elektoral* (Jakarta: Penerbit Gramedia).
- Mujani Saiful, (2012). *Voting Behavior dalam Pemilu Indonesia* (Jakarta: LP3ES).
- Nugroho, H., & Fahmi, M. (2019). Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1).